



Kerugian Negara Rp 442 Juta

■ Bendahara PNPM Pinoh Tersangka ■ Kelompok Simpan Pinjam Fiktif

MELAWI, TRIBUN - Kejaksan Negeri (Kejari) Sintang menetapkan Bendahara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Nanga Pinoh, Melawi, Rosita Nur sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana Simpan Pinjam PNPM. Peretapan ini dilakukan setelah Kejari menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 18 April 2013 lalu.

"Bendaharanya sudah kita tetapkan tersangka. Dari hasil audit, ada kerugian negara yang mencapai Rp 442.823.500. Ini berdasarkan hasil audit BPKP SR-85/dw 14/5/2013 tanggal 18 April," kata Kejari Sintang, Moch Djumali, Selasa (11/6).

Menurut Djumali, dugaan penyelewengan dalam kasus ini yakni adanya kelompok simpan pinjam fiktif, sehingga pengeluaran uang untuk kelompok itu pun fiktif. "Saat mengambil uang seolah-olah ada peminjaman, namun setelah diselidiki ternyata peminjannya juga fiktif," ungkapnya.

Untuk saat ini, Djumali mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada terduga lain yang terlibat dalam kasus ini, namun demikian pihak Kejari belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Selain kasus PNPM, Kejari Sintang juga menuntun kasus pembangunan Stadion Melawi. Kajari mengatakan, untuk kasus pembangunan stadion, pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kemungkinan Agustus keluar hasil audinya, untuk hasil LHR-nya sudah ada, seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu," katanya.

Kata Djumali, setelah hasil audit keluar maka kejaksan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. "Untuk tersangka sudah pasti ada, namun karena belum ada

hasil audit jadi belum bisa ditentukan, kita masih terus melakukan penyelidikan," katanya.

Ia menambahkan, untuk tahun ini pihaknya akan segera melaporkan dua kasus korupsi ke Pengadilan Negeri (PN), yakni kasus workshop dan PN-PM. "Untuk kasus workshop ada dua tersangka, sedang-kan PNPM satu. Kita akan segera melaporkan ke pengadilan untuk menjalani sidang tandanya.

MOCH DJUMALI
Kejari Sintang

nanti setelah tanggal 18 lah ya, jadi belum tahu lah," katanya.

Hingga Selasa (11/6), Tribuna belum memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai hasil audit BPK terhadap RSUD Melawi, Direktur RSUD Melawi, Tanjung Harapan, yang dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, sedang berada di Kejaksaan Negeri Sintang. "Nanti dulu lah ya, saya masih dicek aksesin ini," katanya.

tingkat. Kasus korupsi di kabupaten yang baru berumur sembilan tahun ini memang cukup banyak, mulai dari pembangunan stadion, pembangunan PD-AM Poring, pembangunan gedung workshop, pembangunan kantor Bupati Melawi. (ali)



TRIBUNOK

Hambat Pembangunan

ANGGOTA DPRD Melawi Ridwan Saidi, mendukung upaya penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi di Kota Juang Melawi. Namun ketika penanganan kasus tersebut harus dilaksanakan secara maksimal jangan heboh pada pemberitaan saja. "Selain itu, sudah banyak yang ditangani pelanggaran, namun hasilnya belum terlihat, hanya beberapa saja itu pun yang kecil-kecil," katanya.

Dia mengharapkan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Kasus besar sekalipun jika memang terbukti harus segera diungkap, sehingga tidak meniru-sewajarnya. (ali)